



WTP Mudah, Asal Ikut Aturan Main BPK

PONTIANAK, SP – Angka capaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat melampaui rata-rata nasional. Tercatat 71 persen rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Provinsi Kalbar pada semester pertama tahun ini. Sementara di tingkat nasional, hanya mampu mencapai 61 persen.

“Kita harus tetap meningkatkan angka capaian rekomendasi tindak lanjut BPK

• **Baca Halaman 15**

Hal 9 ■ wtp mudah

walau sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandi Sanjaya, Selasa (13/12) pagi.

Cristiandy ditemui usai Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, di Aula BPK Kalbar mengutarakan Pemda tetap berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah yang bersumber dari rakyat.

Dia mengharapkan, tahun ini semua kabupaten/kota di Kalbar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dikatakannya, rekomendasi sesulit apa pun akan terus dilakukan. Semua berdasarkan semangat pemerintah agar keuangan negara dapat dikelola sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku demi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar mengungkapkan, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK sebenarnya hal mudah. Asalkan Pemda mampu mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Paling tidak menurutnya, ada empat elemen atau unsur wajib yang harus dipenuhi dalam melaporan keuangan daerah.

Empat elemen kepatuhan itu harus diperhatikan seksama. Pertama soal administrasi, jangan sampai salah. Kedua yang harus diperhatikan adalah pemborosan, yang sampai sekarang masih terjadi.

“Ketiga, kemahalan, yakni jangan sampai 20 persen dari proyek, jadi itu harus diperiksa, apakah ada indikasi korupsi di sana. Jangan sampai jadi persoalan,” sebut Bahrullah.

Poin keempat yang harus diperhatikan adalah fiktif. Jika menginginkan berkas rekomendasi perbaikan tipis dari BPK, keempat unsur tersebut harus diperhatikan. Perbaikan berkas-berkas itu pun selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Kalbar yang sebelumnya dijabat oleh Didi Budi Satrio, digantikan oleh Ida Sundari. Didi Budi Satrio selanjutnya dipindahtugaskan sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Hadir dalam acara tersebut anggota VI BPK RI, anggota DPRD RI Dapil Kalbar, Michele Jenro, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati dan Wali Kota Se-Kalbar serta tamu lainnya. **(bls/and)**